

## BAB II PENGOLAHAN DATA

### 2.1 Deskripsi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang akurat, berikut penulis mendeskripsikan data tentang Marjinalisasi dalam Berita Pada Surat Kabar Harian *Riau Pos* Edisi Mei 2018. Ada beberapa praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana dari marjinalisasi ini yaitu: 1. *Eufemisme* (penghalusan makna), 2. *Disfemisme* (pengasaran bahasa), 3. *Labelisasi*, 4. *Stereotipe*. Berikut ini deskripsi data Marjinalisasi Dalam berita pada surat kabar harian Riau Pos edisi Mei 2018

**TABEL 1 DESKRIPSI DATA MARJINALISASI DALAM BERITA PADA SURAT KABAR HARIAN *RIAU POS* EDISI MEI 2018.**

No	Keterangan publikasi	Kode Data	Judul berita	Data	Keterangan
1	1 Mei 2018	01	Kinerja terburuk Se- Riau	<p>Telukkuantan (RP) – dari hasil laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) Pemkab kuansing yang disampaikan setiap tahunnya kepada pemerintah pusat melalui kementarian dalam negeri (Kemendagri), menunjukkan kinerja pemkab kuansing tahun 2016 lalu, berada diperingkat 310 dari 397 kabupaten/kota se-Indonesia.</p> <p><i>Sedangkan untuk Riau, peringkat terakhir dari 12 kabupaten/kota. Hal tersebut dibenarkan sekretaris daerah kabupaten kuansing Dr H Dianto mampanini SE MT saat dihubungi</i></p>	1 mei 2018 lampiran 1 halaman 88

SAMBUNGAN TABEL I

			<p>wartawan akhir pekan lalu. Menurut dianto, penilaian peringkat kinerja tersebut lewat keputusan Mendagri. “Iya benar. Tahun 2016 lalu kita peringkat 310 dari 397 kabupaten/kota se-Indonesia. Kalau untuk Riau, kita peringkat terakhir. Dibandingkan tahun 2015, peringkat kita memang turun drastis dari 233 se-Indonesia. Dianto menjelaskan bahwa LPPD merupakan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif pemerintah pusat dalam mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda. Terutama dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. “Penurunan kinerja pemerintah itu disebabkan banyak indikator. Diantaranya, lambatnya pengesahan APBD, transparansi anggaran, kedisiplinan ASN dan masih banyak lagi. Artinya, penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat,” kata dianto.</p>
--	--	--	---

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SAMBUNGAN TABEL I

2	2 Mei 2018	02	Dewan Segera Panggil PTPN V	<p>PEKANBARU (RP)- Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mengaku geram dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V alasannya, masih ada buruh harian lepas (BHL) digaji Rp 31 ribu per hari. Hal itu menurutnya sangat <i>tidak manusiawi</i>. Serta bertentangan dengan aturan yang ada. Masalah itu diketahui setelah Sugianto datang ke Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Di mana daerah tersebut merupakan areal pekerja PTPN V. “ saya sudah kesana. Kamarin saya reses ke Lubuk Dalam. Bertemu BHL dan pegawai PTPN V,” ujar Sugianto, Selasa (1/5) siang.</p> <p>Lebih lanjut dikatakan dia, dari aduan buruh, pihak perusahaan mengaku diupah Rp 80ribu ketika tim sertifikat <i>indonesian sustainable palm oil</i> (ISPO) datang. “ <i>anehnya lagi, saat memberikan upah ke buruh, pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi. Ini saya heran ada permainan apa di sana,</i>” ungkapnya.</p>	2 Mei 2018 lampiran 2 halaman 89
3	2 Mei 2018		Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako	PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau <i>curiga ada permainan</i> di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah	2 Mei 2018 lampiran 3 halaman 90

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.</p> <p>Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedatangan, mafia sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap <i>pemain sembako</i>. Jangan sampai <i>rakyat semakin menjerit</i> demi keuntungan pribadi,” tegasnya.</p>	
4	4 2018	Mei	04	<p>Diusut Proyek Drainase Rp 11,4 M</p> <p>KEJAKSAAN Negeri (Kejari) pekanbaru <i>mencium</i> adanya dugaan korupsi dalam pembangunan drainase jalan soekarno hatta, pekanbaru pada 2016. Dugaan korupsi ini sedang diusut.</p> <p>Pengerjaan proyek dilakukan dari simpang jalan Riau hingga Mal Ska Pekanbaru. Diduga, pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.</p> <p>Saat itu, Komisi yang membidangi infrastruktur kecewa dengan sejumlah proyek itu. <i>pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan</i>. Akibatnya, hasilnya tampak <i>amburadul</i> dan tidak sesuai dengan nilai proyek yang mencapai</p>	4 Mei 2018 lampiran 4 halaman 91



SAMBUNGAN TABEL I

5	5 Mei 2018	05	Waspada Seynov Ajukan PK	Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.	5 Mei 2018 lampiran 5 halaman 92
6	5 Mei 2018	06	Dewan Minta Kasus PT Duta Palma	Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur. Bahkan ia mengingatkan BLH agar tidak bermain mata dengan perusahaan. Karena masalah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika dalam kenyataan salah, maka BLH harus sampaikan sejujurnya. “Jangan sampai ada yang <i>bermain mata</i> . Coba saja kalau berani. Saya usut sampai tuntas,” tegas politisi Hanura itu	5 Mei 2018 lampiran 6 halaman 93
7	6 Mei 2018	07	Diduga larikan mobil, oknum polisi dilaporkan	<i>Diduga telah menggelapkan mobil</i> , seorang oknum polisi dilaporkan ke Propam Polda. Korban yang bernama Syamsuardi (45) melaporkan oknum tersebut karena telah sebulan mobilnya tak dikembalikan. <i>Mobil yang diduga digelapkan itu, yakni satu unit toyota Avanza BM</i>	6 Mei 2018 lampiran 7 halaman 94

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>1427 IN warna merah. Mobil ini adalah milik Syamsuardi, warga jalan Cipta Karya, Panam. Korban sendiri melaporkan ini ke PropamPolda Riau pada Rabu (2/5). Yang dilaporkan itu oknum polisi inisial SR berpangkat Kopol, dan bertugas di Polda Riau. Mobil ini milik korban, dipinjam oleh oknum polisi sejak 7 April 2018. Namun, hingga saat ini, mobil itu belum dikembalikan. “Dia (oknum, red) sudah saya laporkan ke Propam Polda Riau untuk pertanggungjawabannya atas mobil yang dipinjamkan,” ungkap Syamsuardi, kemarin.</p>	
8	7 Mei 2018	08	Daerah diduga Sering beri Suap	<p><b>SUAP</b> Rp500 juta <i>mengegolkan</i> usulan pembangunan melalui dana perimbangan keuangan daerah tidak lepas dari peran Yaya Purnomo. Yakni seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan. KPK pun mendalami keterlibatan pejabat yang diduga sering <i>mendapat hadiah</i> dari daerah itu. Bahkan, uang yang disita dari apartemen Yaya di wilayah Bekasi lebih besar</p>	7 Mei 2018 lampiran 7 halaman 95

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>dari uang suap yang diterima Amin Satono, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat dan Eka Kamaludin, selaku perantara. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (4/5) lalu, KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, logam mulia 1,9 kilogram, dan 12.500 dolar AS dari kediaman Yaya.</p>	
9	11 Mei 2018	09	<p>Pimpinan JAD Pekanbaru Terduga Provokator Kerusuhan</p>	<p>Kepala Kepala Forensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo akhirnya membuka identitas pria yang didorong di kursi roda tersebut. edi membenarkan jika pria tersebut adalah Wawan Kurniawan alias Abu Afif. “Iya, masih diobservasi,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan <i>WhatsApp</i> kemarin.</p> <p>Hanya sekitar 30 menit dia diperiksa di IGD. Selanjutnya, Abu Afif dirawat di kamar VIP RS Polri. “Luka di bahu kiri,” ujar Edi. Namun, Edi enggan menjelaskan lebih lanjut penyebab luka yang diderita Abu Afif. <i>Abu Afif diduga sebagai pemicu dan provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa lalu (8/5). Pemicunya adalah makanan yang dikirim oleh keluarganya tak</i></p>	11 Mei 2018 lampiran 9 halaman 96

SAMBUNGAN TABEL I

				<p><i>kunjung diberikan petugas. Dia lalu memprovokasi napi lainnya untuk berontak, menjebol terali besi, dan menyerang petugas, wawan ditahan di Mako Brimob lantaran terlibat kasus terorisme.</i></p>	
10	12 Mei 2018	10	Tingkatkan pengawasan pendistribusian Elpiji	<p>Dengan mengetahui jadwal masuknya elpiji, pihaknya dapat turun dan melakukan pengawasan setiap pangkalan yang ada di bukit raya dan bisa langsung bertindak jika terjadi kelangkaan gas di wilayahnya. “Di bukit raya ada 69 pangkalan elpiji bersubsidi. Mereka nanti akan kami surati untuk diberi pembinaan dan pengarahan supaya tidak melakukan penyelewengan,”. Jelasnya Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika <i>bermain</i> dan terbukti maka rekomendasi pemutusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya.</p>	12 Mei 2018 lampiran 10 halaman 97



SAMBUNGAN TABEL I

11	13 Mei 2018	11	Warga Pundi Kayu Dan PT CSS Memanas	KETEGANGAN setempat <i>mewarnai</i> hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Pasalnya, warga setempat setempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.	13 Mei 2018 lampiran 13 halaman 98
12	14 Mei 2018	12	Segera tutup panti pijat	Tempat <i>prostitusi berkedok panti pijat dan spa</i> masih marak di Pekanbaru. Berdasarkan penelusuran Riau Pos, salah satunya ditemukan di jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai. Sepanjang jalan tersebut ditemukan beberapa <i>panti pijat tradisional tanpa izin</i> . Namun dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihak kelurahan Maharatu terus memantau agar panti pijat ini ditutup agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi mengganggu masyarakat dalam beribadah selama Ramadhan. Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan dari masyarakat tentang <i>panti pijat plus-plus</i> . Namun berdasarkan pantauan kami <i>ada satu</i>	14 Mei 2018 lampiran 14 halaman 99

SAMBUNGAN TABEL I

				<i>atau dua panti pijat yang masihi dicurigai masih buka.</i>	
13	17 Mei 2018	13	Investor Mulai Cemaskan Keamanan	<p>Seperti diketahui, aksi teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo Ahad (13/5) dan Senin (14/5) lalu. Selanjutnya, aksi teroris kembali terjadi, Rabu (16/5). Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda) Riau diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai. Samsul menuturkan, kondisi tersebut <i>turut mempengaruhi persepsi</i> para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedng BEI, Rabu(16/5). Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal</p>	13 Mei 2018 lampiran 13 halaman 100

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.</p> <p><i>Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terguncang. "Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat," imbuhnya. Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian.</i></p> <p><i>"Investor sebenarnya sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi," ujarnya.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SAMBUNGAN TABEL I

14	22 Mei 2018	14	Plt Gubri berang, tak dilibatkan kemenag	<p>Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim (WTH) <i>meradang</i>. Ia kesal dan <i>berang</i> karena merasa diacuhkan Kementerian Agama (Kemenag) RI perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau. Kemudian kemenag RI diketahuinya belakangan mengirim tim tanpa diketahui pemprov.</p> <p>“Mengadulah Asisten I (Ahmad Syah Harrofie) kepada saya, ternyata persis dugaan saya, dia (tim kemenag) didampingi Kanwil Agama. Kita ini jadi <i>kambing congek</i>, sama saya tidak ada tu, besok saya menghadap Moeldoko, minta beliau tanya langsung soal keseriusan Menteri Agama, karena rakyat kita sudah menunggu itu,”paparnya.</p>	22 Mei 2018 lampiran 14 halaman 101
15	24 Mei 2018	15	Oknum ASN dan Honorer Dipolisikan	<p>Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial Fir (50) berwsama onum honorer bersinisial Azh (43) dipolisikan oleh Aswari yang juga</p>	24 Mei 2018 lampiran 15 halaman 102



SAMBUNGAN TABEL I

				<p>sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). <i>Pasalnya, oknum ASN bersama honorer tersebut diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.</i></p> <p><i>Di mana laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut sudah diterima Satreskrim Polres Inhu pada Jumat (18/5) pekan kemarin. Dalam laporan tersebut ada oknum ASN berinisial Fir bertugas di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Inhu dan Ahz, oknum honorer di salah satu kantor camat sebagai terlapor.</i></p> <p>Diakuirnya, laporan polisi dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Avanza ke Mapolres Inhu ini, adalah tindak lanjut laporan di Mapolsek Rengat Barat pada 4 November 2014.</p> <p>Untuk penetapan tersangka dan dugaan keterlibatan orang lain sambungnya, harus dilakukan gelar perkara. Bahkan pihaknya, juga telah</p>	
--	--	--	--	--	--

SAMBUNGAN TABEL I

				menjadwalkan gelar perkara pada pekan depan. <i>“Sepertinya laporan di Polsek Rengan Barat tidak sesuai dengan kejadiannya. Sehingga wajar saja ada laporan baru di Satreskim,” terangnya.</i>	
16	27 Mei 2018	16	Diskes Diminta Hentikan Operasi DAMIU Tak Sehat	<i>Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi, membuat masyarakat menjadi resah. Pasnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan. Diungkapkan amrizal yang merupakan mantan anggota DPRD pelalawan periode pertama terbentuknya Kabupaten Pelalawan, jika Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka tentunya akan berdampak sangat buruk.</i>	27 Mei 2018 lampiran 16 halaman 103
17	28 Mei 2018	17	Karyawan Mogok,PT Sun Lumpuh	KARYAWAN PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi <i>mogok kerja</i> , sejak empat hari yang lalu.	28 Mei 2018 lampiran 17 halaman 104

SAMBUNGAN TABEL I

					<p>Akibatnya, pabrik kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi tersebut <i>lumpuh</i>. Selain tidak adanya aktivitas, perusahaan tersebut harus <i>menelan</i> kerugian dengan membusuknya ratusan ton buah sawit yang akan diproduksi. <i>Mogoknya</i> puluhan karyawan tersebut dikarenakan adanya sebagian tuntutan yang belum di setujui oleh pihak perusahaan. Terutama masalah jam kerja dan <i>mutasi karyawan</i> yang dinilai merugikan karyawan.</p>	
18	28 Mei 2018	18	Tegur Petani Tak Tanam Bibit Sawit Bantuan Pemeritah	<p>TELUKKUANTAN (RP)- Juru bicara DPRD Kuansing, Drs Darmizar saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 <i>menyoroti bantuan sawit yang disalurkan gratis kepada para petani “Bibit sawit yang masih belum ditanam oleh masyarakat penerima bantuan itu supaya dicek ke lapangan. Dan diberi</i></p>	28 Mei 2018 lampiran 18 halaman 105	

SAMBUNGAN TABEL I

			<p><i>peringatan oleh Dinas Pertanian,” ujar Darmizar saat sampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing, belum lama ini. Karena itu, Politisi PPP Kuansing ini mendesak agar Pemkab Kauning melalui Dinas Pertanian menegur atau memberi peringatan kepada para petani yang didapati tidak menanam bibit sawit yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu. Pasalnya, kata DPRD, pihaknya menduga banyak petani yang belum menanam bibit sawit tersebut. “Harus di cek ke lapangan. Pastikan bibit sawit yang dibantu itu mereka tanami. Kalau masih ada yang belum, tegur mereka. Apa masalah sehingga mereka tidak menanam,” ujarnya. Sebelumnya, anggota DPRD Kuansing lainnya, Jefri Antoni ST berulang-kali mengingatkan agar bibit yang diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan</i></p>
--	--	--	--



SAMBUNGAN TABEL I

					<p>kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. <i>“Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada,”</i> kata Politisi Demokrat itu.</p>	
19	29 Mei 2018	19	Demo, Mahasiswa Tuding Ada Monopoli Proyek di Kampar	<p>BANGKINANG (RP)-Puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar), menggelar aksi unjuk rasa atau demo di halaman depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Senin (28/5). <i>Para mahasiswa dan pemudan ini menuding adanya monopoli dalam pembagian proyek-proyek di Pemkab Kampar. Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut.</i></p>	29 Mei 2018	lampiran 19 halaman 106

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SAMBUNGAN TABEL I

				<p>“Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,” ungkapnya.</p> <p>Sekda Kampar Yusri yang berhasil dihubungi wartawan sore kemarin menyebutkan, para pendemo itu bukan tidak ditemui pemkab. Tapi waktu aksi mereka terlalu singkat dan mereka juga menggelar demo berdekatan dengan waktu salat Zuhur. Hingga ketika adzan sudah mulai dekat, baik pendemo maupun Pemkab Kampar sudah sama-sama tidak ada waktu lagi.</p> <p>Ketika ditanya terkait tuduhan monopoli proyek, Yusri tidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang</p>	
--	--	--	--	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SAMBUNGAN TABEL I

				<i>ada yang katanya seperti itu, itu saran saya” Terangnya.</i>	
20	31 Mei 2018	20	Teroris, Waspada Pendatang Baru	Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris	31 Mei 2018 lampiran 20 halaman 107

## 2.2 Analisis Data

Berdasarkan deskripsi data yang sudah ditunjukkan sebelumnya mengenai Marjinalisasi dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos* edisi Mei 2018, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data terhadap data yang sudah dideskripsikan tersebut berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada empat jenis marjinalisasi yang akan dianalisis. Keempat jenis tersebut yaitu: *eufemisme* (penghalusan makna), *disfemisme* (bahasa pengasaran), *labelisasi*, dan *stereotype*. Analisis ini dilakukan pada setiap indikator marjinalisasi (*eufemisme*, *disfemisme*, *labelisasi*, dan *stereotype*) secara berurutan yang dideskripsikan dalam sebuah paragraf.

### 2.2.1 Analisis Marjinalisasi *Eufemisme* (Peghalusan Makna)

Berdasarkan pada kode data 01, 05, 07, 11, 13. Terdapat marjinalisasi jenis *Eufemisme*. *Eufemisme* (penghalusan makna) adalah pemakaian kata-kata untuk mengubah realitas (kejadian) yang buruk atau kasar berubah menjadi halus, akibatnya khalayak (masyarakat) atau pembaca tidak mampu melihat kenyataan sebenarnya yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis teks beritanya. *Eufemisme* merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh media (Eriyanto, 2008:125). Salah satu alasan kenapa *eufemisme* lebih banyak diterapkan dalam tulisan di media cetak karena *eufemisme* lebih cocok digunakan untuk menggambarkan tindakan pelaku sosial secara individu/kelompok/lembaga kepada masyarakat ke bawah (Eriyanto, 2008:125).

Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

Dibandingkan tahun 2015, peringkat kita memang turun drastis dari 233 se-Indonesia. Dianto menjelaskan bahwa LPPD merupakan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif pemerintah pusat dalam mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda. Terutama dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. “*Penurunan kinerja pemerintah itu disebabkan banyak indikator. Diantaranya, lambatnya pengesahan APBD, transparansi anggaran, kedisiplinan ASN dan masih banyak lagi. Artinya, penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat,*” kata dianto. (kode 01)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 1 Mei 2018 dengan judul berita “Kinerja terburuk Se- Riau.” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah Pemkab Kuansing yang menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kuansing. *Eufemisme* tampak



digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, menjelaskan bahwasannya banyak indikator yang mempengaruhi penurunan kinerja pemerintah Kuansing. Yakni dijelaskan bahwasannya *lambatnya pengesahan APBD*, APBD adalah salah satu anggaran atau dana yang paling berpengaruh dalam kinerja pemerintah kuansing karena tanpa dana, rencana yang telah dianggarkan oleh pemerintah kuansing yang nantinya akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kinerja pemerintah kuansing tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu, *transparansi anggaran*, transparansi anggaran adalah anggaran yang sudah dirincikan oleh pihak pemerintahan yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dianggarkan karena merupakan salah satu sebab terhambatnya kinerja pemkab Kuansing dari kalimat tersebut membuat penilaian bahwa anggaran yang telah dirincikan pemerintah tidak sesuai di lapangan (kondisi) diibaratkan Pemkab Kuansung akan melakukan penyelewengan dana. Dipertegas kembali dari kalimat yakni *penilaian itu berdasarkan kondisi di lapangan. Termasuk soal pengisian data yang diminta pemerintah pusat* merupakan penurunan kinerja pemerintah kabupaten Kuansing karena tanpa dana pemerintah kabupaten Kuansing tidak akan bekerja, anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah, belum disetujui oleh pihak DPRD, pemerintah kesannya tidak akan membantu masyarakat kalau tidak adanya uang dalam setiap menjalankan tugasnya, Pemerintah terkesan tidak mau melayani tiap tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah terkesan tidak ikhlas membantu masyarakat.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “*kehilangan*” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar. (kode 05)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Waspada Setnov Ajukan PK” yang menjadi pelaku sosial adalah Setya Novianto selaku tersangka korupsi yang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai hukum melawan putusan hakim. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andreas Marbun Marbun menghimbau kepada masyarakat harus tetap mengawasi pergerakan dari seorang tersangka korupsi yakni Setnov karena saat ini kondisi Mahkamah Agung (MA) “*kehilangan*” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini.

Bagi masyarakat umum, istilah Waspada hanya akan dipahami kalau ada bahaya secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan waspada yang terdapat dalam isi berita yang mereka baca. Berita yang dimaksud adalah marbun mengingatkan pada masyarakat agar tidak lengah memperhatikan gerak-gerik Setnov yang diisukan akan mengajukan peninjauan kembali sebagai cara untuk melawan putusan hakim karena Marbun menganggap Mahkamah Agung (MA)

“*kehilangan*” sesosok hakim pidana yang garang. Untuk membantu masyarakat dalam memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata “*kehilangan*” yang berarti hilangnya sesuatu. Jadi, kata “*kehilangan*” dalam konteks berita tersebut adalah tidak adanya sesosok hakim yang adil dalam menghukum koruptor atau tidak memihak dan dalam pandangan marbun sebagai MaPPi menilai MA saat ini membutuhkan sesosok Hakim yang tegas dan keras dalam menghukum koruptor agar tidak ada lagi yang berbuat korupsi di Indonesia.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Yang dilaporkan itu oknum polisi inisial SR berpangkat Kopol, dan bertugas di Polda Riau. Mobil ini milik korban, dipinjam oleh oknum polisi sejak 7 April 2018. Namun, hingga saat ini, mobil itu belum dikembalikan. “*Dia (oknum, red) sudah saya laporkan ke Propam Polda Riau untuk pertanggungjawabannya atas mobil yang dipinjamkan,*” ungkap Syamsuardi, kemarin. Kode 07)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 6 Mei 2018 dengan judul berita “Diduga larikan mobil oknum polisi dilaporkan.” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah seorang polisi yang berpangkat Kopol *eufemisme* tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, oknum polisi yang berpangkat kopol dan bertugas di Polda Riau meminjam mobil seorang tetangganya namun, oknum tersebut tidak mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya, Syamsuardi pun mengambil salah satu tindakan dengan melaporkan oknum tersebut ke Propam Polda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oknum polisi tersebut

awalnya berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan syamsuardi mulai dari mobil tersebut dipinjam kawannya hingga mobil tersebut dinyatakan hilang saat ditanyakan oleh syamsuardi mengenai dimana mobil miliknya yang hingga saat ini belum kunjung dikembalikan. kesannya oknum yang dilaporkan tidak menjaga amanat dan menjaga kepercayaan yang diberikan syamsuardi dalam meminjam mobil miliknya tersebut dan terkesan tidak bertanggung jawab, kalau dalam hal meminjam sebuah barang saja seorang oknum polisi tidak bertanggungjawab bagaimana dengan tugas yang diembannya.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KETEGANGAN sempat *mewarnai* hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Pasalnya, warga setempat sempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.(kode 11)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 13 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Warga Pundi Kayu Dan PT CSS Memanas” yang menjadi pelaku sosial adalah warga Desa Pundi Kayu yang merasa resah dengan pengerjaan alat berat milik PT Citra Sumber Sejahtera (CSS). Karena warga merasa PT CSS telah melanggar kesepakatan dengan mereka mengenai lahan yang disengketakan.

Bagi masyarakat umum, istilah *memanas* hanya akan dipahami kalau ada dua kelompok yang bersitenggang secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan *memanas*



yang terdapat dalam isi berita yang mereka baca. Berita yang dimaksud adalah sekelompok warga merasa resah karena PT CSS telah melanggar kesepakatan dengan mereka mengenai lahan yang disengketakan dengan menanam tanaman akasia diantara sawit milik warga. Untuk membantu masyarakat dalam memahami istilah tersebut, jurnalis menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata “mewarnai” yang berarti suatu keadaan itu tidak tegang atau terjadi keriuhan . Jadi, kata “*mewarnai*” dalam konteks berita tersebut adalah tergolong dalam *eufemisme* karena penghalusan makna dari kata mewarnai tersebut tidak ada kegiatan yang menyebabkan tumpah darah atau terkesan anarkis.

Selanjutnya *eufemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Samsul menuturkan, kondisi tersebut *turut mempengaruhi persepsi* para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedung BEI, Rabu(16/5).

Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.

*Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terguncang.”Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat,”imbuhnya.*

*Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian. “Investor sebenarnya*

sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh *pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi,*”ujarnya.  
(kode 13)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 17 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Investor Mulai Cemaskan Keamanan” yang menjadi pelaku sosial adalah Investor yang mulai mencemaskan keamanan di Indonesia dengan adanya aksi teror bom bunuh diri di Sidoarjo dan aksi teroris di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau yang diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai.

Aksi teror bom bunuh diri dan teroris tersebut dianggap mempengaruhi pasar saham Indonesia yang belum bisa bangkit kembali dari ke level 6.000-an. Menurut Samsul Hidayat selaku Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan sulitnya bangkit IHSG yang bangkit dari zona merah tak terlepas dari isu aksi terorisme yang mengusik keamanan Indonesia dalam beberapa hari terakhir., dengan aksi terorisme tersebut membuat investor mulai cemas dengan keamanan di Indonesia. Padahal Indonesia sudah memberikan jaminan fundamental ekonomi kepada investor terhadap keberlangsungan investasi di Indonesia.

Bagi masyarakat umum, istilah investor cemas keamanan tidak akan dipahami secara langsung begitu mereka membaca surat kabar tersebut. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan istilah investor yang mencemaskan keamanan di Indonesia. Untuk membantu masyarakat dalam

memahami istilah tersebut, jurnalis menyederhanakan bahasanya kondisi keamanan di Indonesia saat ini sedang goyah yang menyebabkan melemahnya sisi perekonomian.

### 2.2.2 Analisis Marjinalisasi *Disfemisme* (Bahasa Pengasaran)

Berdasarkan pada kode data 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18. Terdapat marjinalisasi jenis *disfemisme*. Jika *eufemisme* mengenai penghalusan makna, *disfemisme* sebaliknya. Praktik wacana *disfemisme* yakni pemakaian bahasa pengasaran. Ketika *eufemisme* dapat mengakibatkan realitas yang halus, *disfemisme* sebaliknya dapat mengakibatkan realitas menjadi kasar (Eriyanto, 2008:125). *Disfemisme* umumnya sering digunakan untuk menyebut tindakan yang dilakukan masyarakat bawah. Namun, ternyata pada praktiknya *disfemisme* digunakan tidak hanya untuk masyarakat bawah saja tetapi juga bisa digunakan untuk kalangan kelas atas. Misalnya, untuk sebuah nama kelompok atau instansi besar. Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedatangan, *mafia sembako* agar langsung ditangkap. (kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako”. Dari judul berita, pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata yang miring. Frasa *mafia sembako* merupakan penyebutan yang dilakukan kalangan pengusaha kepada masyarakat bawah. Dengan penyebutan frasa tersebut terkesan

kasar karena penggunaan kata *mafia* itu sendiri adalah perkumpulan yang bergerak dibidang kejahatan.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) pekanbaru *mencium* adanya dugaan korupsi dalam pembangunan drainase jalan soekarno hatta, pekanbaru pada 2016. Dugaan korupsi ini sedang diusut.

Pengerjaan proyek dilakukan dari simpang jalan Riau hingga Mal Ska Pekanbaru. Diduga, pengerjaan proyek tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Saat itu, Komisi yang membidangi infrastruktur kecewa dengan sejumlah proyek itu. *pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan*. Akibatnya, hasilnya tampak *amburadul* dan tidak sesuai dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah. (kode 04)

kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang diterbitkan surat kabar Riau Pos edisi 4 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan stragtegi misreprensentasi kategori *disfemisme*. Pada kutipan teks berita dengan judul “Diusut Proyek Drainase Rp 11,4 M “ pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *mencium*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru merasa curiga terhadap proyek pembangunan drainase pada jalan yang menelan anggaran Rp 11,4 M. Karena pengerjaan proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan dapat dilihat pada teks diatas yang dicetak tebal. Kata *mencium* diindikasikan kasar karena Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru ingin mengusut mengenai proyek tersebut hanya karena merugikan keuangan negara. Ditambah dengan pernyataan dari komisi yang membidangi infrastruktur yang menyebutkan pengerjaan proyek



tersebut asal-asalan, amburadul dan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan negara.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. *Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.* (kode 05)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *garang* merupakan penyebutan yang dilakukan kalangan atas yakni Seorang Mahkamah Konstitusi yang terkenal dengan sikap kerasnya dalam menghukum koruptor. Penggunaan kata *garang* tergolong kasar karena penyebutan tersebut adalah terkesan sangar, pemaarah dengan konotasi negatif. Padahal dalam masalah ini sebenarnya mengandung konotasi positif karena tidak ada MA yang berani menghukum koruptor segarang MA yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur. Bahkan ia mengingatkan BLH agar tidak bermain mata dengan perusahaan. Karena masalah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika dalam kenyataan salah, maka BLH harus sampaikan sejujurnya. “Jangan sampai ada yang *bermain mata*. Coba saja kalau berani. Saya usut sampai tuntas,” tegas politisi Hanura itu. (kode 06)

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Dewan Minta Kasus PT Duta Palma Diusut Tuntas” diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos, edisi , 5 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut Suhardiman Amby selaku Dewan Politisi Hanura, yang menuturkan bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) dikabupaten Kuantan Singingi ( Kuansing) yang menjadi pelaku sosial dalam kutipan teks berita. Ia menduga ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Duta Palma yang menyebabkan air sungai yang tercemar oleh limbah dari PT tersebut. Suhardiman Amby menyebutkan bahwa jangan sampai BLH *bermain mata* dengan perusahaan, karena tugas dari BLH itu ialah menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Ia berharap BLH dapat bekerja dengan jujur, karena masalah ini menyangkut masyarakat banyak. Frasa *bermain mata* yang diungkapkan oleh Suhardiman Amby memiliki konotasi kurang baik atau kasar, yang artinya bekerjasama, ia berharap agar BLH dikabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mengemban tugasnya jangan sampai bekerjasama dalam mengusut kasus pencemaran sungai kukok tersebut. Ungkapan yang dituturkan oleh DPRD Riau Dapil Kuansing Suhardiman Amby mengenai BLH dikabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dipandang buruk dan tidak bekerja dengan jujur. Maka itu, ia berharap agar BLH harus menyampaikan sejujurnya mengenai pencemaran sepanjang aliran sungai kukok. Jadi, dengan adanya kutipan teks berita tersebut pendapat Eriyanto sebelumnya yang menyatakan *disfemisme* hanya untuk kategori masyarakat bawah terbantahkan.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

**SUAP** Rp500 juta *mengegolkan* usulan pembangunan melalui dana perimbangan keuangan daerah tidak lepas

dari peran Yaya Purnomo. Yakni seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan. KPK pun mendalami keterlibatan pejabat yang diduga sering *mendapat hadiah* dari daerah itu. Bahkan, uang yang disita dari apartemen Yaya di wilayah Bekasi lebih besar dari uang suap yang diterima Amin Satono, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat dan Eka Kamaludin, selaku perantara. Dalam *operasi tangkap tangan* (OTT) yang dilakukan pada Jumat (4/5) lalu, KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, logam mulia 1,9 kilogram, dan 12.500 dolar AS dari kediaman Yaya. (kode 08

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Daerah diduga Sering beri Suap” diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos, edisi 7 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut jurnalis menggunakan kata *mengegolkan*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan bahwa seorang Kepala Seksi (Kasi pengembangan pendanaan Kawasan perumahan dan pemukiman ditjen perimbangan kementerian keuangan) yakni Yaya Purnomo yang diidentifikasi terlibat kasus suap yang tidak lepas dari perannya. KPK pun saat ini sedang mendalami keterlibatan Yaya. Yaya diduga sering *mendapat hadiah* dari daerah sebagai upah tutup mulutnya mengenai pembangunan tersebut. Dalam *operasi tangkap tangan* KPK berhasil mengamankan uang Rp 1,4 miliar, 1,9 kilogram logam mulia dan 12.500 dolar AS dari kediamannya. Kata *mengegolkan* diindikasikan kasar karena seolah Yaya Purnomo berjuang dengan susah payah untuk usulan pembangunan yang sebenarnya sangat mudah dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki banyak uang.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Dengan mengetahui jadwal masuknya elpiji, pihaknya dapat turun dan melakukan pengawasan setiap pangkalan yang



ada di bukit raya dan bisa langsung bertindak jika terjadi kelangkaan gas di wilayahnya. “Di bukit raya ada 69 pangkalan elpiji bersubsidi. Mereka nanti akan kami surati untuk diberi pembinaan dan pengarahan supaya tidak melakukan penyelewengan,”. Jelasnya Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika *bermain* dan terbukti maka rekomendasi pemutusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya. (kode 10)

Pada kutipan teks berita dengan judul “Tingkatkan Pengawasan Pendistribusian Elpiji” edisi 12 Mei 2018 pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *bermain*. Melalui penggunaan kata tersebut menjelaskan mengenai gas elpiji yang ada disetiap pangkalan di Kecamatan Bukit Raya harus melakukan pemantauan dan turun langsung mengawasi. Kata *bermain* diindikasikan kasar karena kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak pengusaha pangkalan yang dianggap merugikan masyarakat dengan cara di ecer kembali. Ditambah dengan pernyataan dari Camat Bukit Raya Maskur Tarmizi akan menindak lanjuti pangkalan tersebut dan Pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap pengusaha pangkalan yang menyusahkan masyarakat. Seperti menjual elpiji pada bukan peruntukannya seperti dijual ke pedagang atau diecer kembali. “Ingat, jika *bermain* dan terbukti maka rekomendasi pemutusan (PHU) hubungan usaha akan kami kirim ke DPP,” tutupnya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KETEGANGAN sempat mewarnai hubungan warga Desa Pundi Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Citra Sumber Sejahtera



(CSS). *Pasalnya, warga setempat sempat menghentikan paksa alat berat milik perusahaan tersebut.*(kode 11)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 13 Mei 2018 selain terdapat marjinalisasi *eufemisme* juga terdapat praktik wacana *disfemisme*. Hal tersebut tampak pada kata *menghentikan paksa* yang diindikasikan kasar karena tindakan yang dilakukan masyarakat bawah kepada kalangan atas yakni pihak perusahaan yang alat berat milik perusahaan diberhentikan paksa oleh masyarakat karena tergolong kegiatan yang anarkis.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Tempat *prostitusi berkedok panti pijat dan spa* masih marak di Pekanbaru. Berdasarkan penelusuran Riau Pos, salah satunya ditemukan di jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai. Sepanjang jalan tersebut ditemukan beberapa *panti pijat tradisional tanpa izin*.

Namun dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihak kelurahan Maharatu terus memantau agar panti pijat ini ditutup agar tidak meresahkan masyarakat. Apalagi mengganggu masyarakat dalam beribadah selama Ramadhan. Hingga saat ini kita belum mendapatkan laporan dari masyarakat tentang *panti pijat plus-plus*. Namun berdasarkan pantauan kami *ada satu atau dua panti pijat yang masihi dicurigai masih buka*. (kode 12)

Judul berita kutipan teks di atas adalah “Segera Tutup Panti Pijat” diterbitkan oleh surat kabar harian Riau Pos, edisi 14 Mei 2018. Melalui kutipan teks berita tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pekanbaru. Bahwa, tidak semua panti pijat tradisional dan spa di jalan kartama Kecamatan Marpoyan Damai ini dijalankan dengan legal. Panti pijat tidak hanya memberikan pelayanan untuk pijat tetapi juga pelayanan prostitusi begtu juga dengan spa. Jurnalis menggunakan istilah *prostitusi* bagi panti pijat yang mejadi

pelaku sosial dalam kutipan teks berita tersebut. Istilah *prostitusi* digunakan bagi individu atau kelompok yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui pelayanan seks secara ilegal. Hal tersebut hanya dilakukan bagi seseorang atau kelompok tertentu yang membutuhkan uang. Dengan kata lain, seseorang atau kelompok tertentu yang dikategorikan masyarakat bawah.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim (WTH) *meradang*. Ia kesal dan *berang* karena merasa diacuhkan Kementerian Agama (Kemenag) RI perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau.

Kemudian kemenag RI diketahuinya belakangan mengirim tim tanpa diketahui pemprov. “Mengadulah Asisten I (Ahmad Syah Harroffie) kepada saya, ternyata persis dugaan saya, dia (tim kemenag) didampingi Kanwil Agama. Kita ini jadi *kambing congek*, sama saya tidak ada tu, besok saya menghadap Moeldoko, minta beliau tanya langsung soal keseriusan Menteri Agama, karena rakyat kita sudah menunggu itu,”paparnya. (kode 14)

kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang diterbitkan surat kabar Riau Pos edisi Selasa, 22 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi kategori disfemisme. Pada kutipan teks berita dengan judul “Plt Gubri berang, tak dilibatkan kemenag” pada kutipan teks berita di atas diidentifikasi menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan frasa *kambing congek*. Melalui penggunaan frasa tersebut H Wan Thamrin Hasyim ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasannya ia merasa diacuhkan Kementerian Agama Republik Indonesia perihal rencana realisasi Embarkasi Haji Antara (EHA) 2018 Provinsi Riau. H Wan Thamrin Hasyim merasa bahwasannya ia sebagai Plt Gubernur Riau hanya

sebagai *kambing congek*, frasa tersebut memiliki konotasi kurang sedap atau kasar yang bermakna dungu atau bodoh mengenai rencana EHA 2018 Provinsi Riau yang dianggap tidak terealisasi sesuai dengan rencananya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

*Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi, membuat masyarakat menjadi resah. Peralnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan.*

Diungkapkan amrizal yang merupakan mantan anggota DPRD pelalawan periode pertama terbentuknya Kabupaten Pelalawan, jika Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka tentunya akan berdampak sangat buruk. (kode 16)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 27 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *disfemisme*. Hal tersebut terlihat pada penggunaan *Banyaknya depot minum isi ulang (DAMIU) yang diindikasikan tidak layak konsumsi dan Peralnya, jika salah meminumnya akan berdampak buruk bagi kesehatan* yang ditujukan pada Dinas Kesehatan (Diskes) Melalui penggunaan bahasa tersebut, jurnalis ingin menyampaikan kepada masyarakat terutama Dinas Kesehatan jika selama ini masih ada belasan atau 20 persen lagi DAMIU yang belum memenuhi syarat konsumsi. Peralnya, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan dr Endit R Pratiknyo menyebutkan, Diskes pelalawan belum lama ini telah menemukan belasan DAMIU di pelalawan yang belum memenuhi kriteria sehat dan layak untuk diminum. Padahal sudah sangat jelas minuman tersebut tidak layak konsumsi namun, Dinas Kesehatan masih memberikan toleransi terhadap permasalahan yang langsung berhubungan dengan



kesehatan masyarakat dengan masih banyaknya depot air minum isi ulang yang *tidak memiliki sertifikat layak sehat* karena *mengandung bakteri E.coli* yang dapat *merusak kesehatan* dan *berdampak sangat buruk*. Dalam kasus ini Diskes pelalawan terus melakukan pembinaan sebagai upaya agar seluruh DAMIU memenuhi kriteria sehat dan layak konsumsi yang dibekali sertifikat layak sehat, sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali mengambil sampel air dari seluruh DAMIU untuk dilakukan pemeriksaan di Labkesda Pekanbaru, sehingga air yang *dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat* atau layak konsumsi.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KARYAWAN PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi *mogok kerja*, sejak empat hari yang lalu. Akibatnya, pabrik kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi tersebut *lumpuh*. Selain tidak adanya aktivitas, perusahaan tersebut harus *menelan* kerugian dengan membusuknya ratusan ton buah sawit yang akan diproduksi.

*Mogoknya* puluhan karyawan tersebut dikarenakan adanya sebagian tuntutan yang belum di setujui oleh pihak perusahaan. Terutama masalah jam kerja dan *mutasi karyawan* yang dinilai merugikan karyawan. (kode 17)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 28 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *mogok kerja*. Melalui penggunaan kata tersebut karyawan PT Sinar Utama Nabati (SUN) melakukan aksi mogok kerja. Istilah *mogok kerja* yang digunakan jurnalistik terkesan kasar. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan frasa



*mogok kerja* menurut KBBI adalah menghentikan kegiatan pekerjaan karena adanya tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan atau tempat bekerja dalam teks isi berita tersebut. Jadi, frasa *mogok kerja* dalam konteks berita tersebut adalah karyawan merasa pihak perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan lembur yang dikerjakan karyawan. Ditambah lagi dengan adanya *mutasi karyawan* yang dinilai merugikan karyawan hal tersebut terbukti dengan mengutus salah satu perwakilan untuk bertanya mengenai uang lembur digaji mereka nantik. Tetapi bukannya mendapat jawaban pihak perusahaan memutasikan karyawan tersebut. *Mutasi karyawan* tersebut dinilai merugikan karyawan sehingga mereka melakukan aksi mogok kerja yang menyebabkan PT SUN lumpuh atau tidak memproduksi sawit selama empat hari yang lalu. Menyebabkan karyawan terkesan tidak mau bekerja atau berhenti bekerja atau berhenti bekerja sesukanya.

selanjutnya *disfemisme* juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

TELUKKUANTAN (RP)- Juru bicara DPRD Kuansing, Drs Darmizar saat menyampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 *menyoroti bantuan sawit yang disalurkan gratis kepada para petani “Bibit sawit yang masih belum ditanam oleh masyarakat penerima bantuan itu supaya di-cek ke lapangan. Dan diberi peringatan oleh Dinas Pertanian,”* ujar Darmizar saat sampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing, belum lama ini.

Karena itu, Politisi PPP Kuansing ini *mendesak* agar Pemkab Kaunsing melalui Dinas Pertanian *menegur* atau memberi peringatan kepada para petani yang didapati tidak menanam bibit sawit yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu. Pasalnya, kata DPRD, *pihaknya menduga banyak petani yang belum menanam bibit sawit tersebut. “Harus di cek ke lapangan. Pastikan bibit sawit*

*yang dibantu itu mereka tanami. Kalau masih ada yang belum, tegur mereka. Apa masalah sehingga mereka tidak menanam,” ujarnya.*

Sebelumnya, anggota DPRD Kuansing lainnya, Jefri Antoni ST berulang-kali mengingatkan agar bibit yang diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. “Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada,” kata Politisi Demokrat itu. (kode 18)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 28 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori menggunakan praktik wacana disfemisme. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *tegur*. Melalui penggunaan kata tersebut Drs Darmizar juru bicara DPRD Kuansing, menyampaikan pendapatnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing tahun 2017 mengenai bantuan berupa bibit sawit yang disalurkan secara gratis kepada para petani yang ia lihat penerima bantuan itu belum menanam bibit-bibit sawit tersebut. Istilah “menegur” yang digunakan jurnalistik terkesan kasar. Pada kutipan teks berita tersebut, jurnalis menggunakan kata *menegur* yang berarti dalam teks isi berita tersebut adalah memberi peringatan seolah-olah para petani melakukan kesalahan layaknya pekerja perusahaan atau karyawan yang mendapat gaji tetap. Jadi, kata *menegur* dalam konteks berita tersebut adalah memberi peringatan dan mendesak kepada para petani yang didapati tidak menanam bibit sawit tersebut yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Jefri Antoni ST yang Sebelumnya berulang-kali mengingatkan agar bibit yang

diserahkan gratis kepada masyarakat itu tepat sasaran. Dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk ketersediaan lahannya. *Sudahlah bibit itu kualitasnya kurang. Penyalurannya pun tak tepat. Makanya, pastikan yang menerima bibit itu masyarakat kita yang butuh. Lahannya ada*, dari pernyataan tersebut politisi Demokrat beranggapan penyaluran bibit sawit kepada masyarakat bawah tidak tepat sasaran sehingga petani yang mendapat bantuan dari anggaran miliaran rupiah tersebut terkesan mengacuhkan teguran dari DPDR kuansing.

### 2.2.3 Analisis Marjinalisasi Labelisasi

Berdasarkan pada kode data 03, 12, 20. Terdapat marjinalisasi jenis Labelisasi. Praktik wacana *labelisasi* adalah merupakan perangkat bahasa yang digunakan oleh mereka yang berada di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawannya (Eriyanto, 2008:126). Praktik wacana dengan menggunakan labelisasi ini hampir sama dengan praktik wacana disfemisme. Namun, *labelisasi* dapat langsung teridentifikasi ketika ditemukannya pemberian “sebutan” atau “julukan” pada pelaku sosial yang dianggap memiliki kedudukan rendah oleh pelaku sosial yang memiliki kedudukan tinggi. Selain itu, labelisasi adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.

Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau curiga ada permainan di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedapatan, mafia

sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap *pemain sembako*. Jangan sampai rakyat semakin menjerit demi keuntungan pribadi,” tegasnya.(kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako’. Dari judul berita, dapat segera diketahui bahwa selain terdapat *disfemisme*, jurnalis juga menggunakan *labelisasi* pada tulisannya. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata *pemain* pada judul berita dan kalimat pada teks berita di atas “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau curiga ada permainan di tingkat distribusi sembako.”

Mengapa digunakan kata *pemain* pada teks berita tersebut. Jurnalis ingin menyampaikan kepada masyarakat Riau sebagai pembaca bahwa saat ini ada pihak yang mengambil untung menjual sembako dengan harga mahal . Hal tersebut diketahui saat rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi B DPRD Riau dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi, Bulog dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), diketahui tidak ada masalah dengan stok. Sekretaris Komisi B DPRD Riau Mansyur HS mencurigai pihak distribusi yang menjadi *Pemain Sembako* sebagai pelaku sosial.

selanjutnya Labelisasi juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Seperti diketahui, *aksi teror bom bunuh diri* di Surabaya dan Sidoarjo Ahad (13/5) dan Senin (14/5) lalu. Selanjutnya,*aksi teroris* kembali terjadi, Rabu (16/5). Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau diserang oleh *kawanan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai*.



Samsul menuturkan, kondisi tersebut turut mempengaruhi persepsi para investor yang berimbas pada kecemasannya mereka di dalam negeri. “Jadi semakin banyak gangguan keamanan yang terjadi, maka persepsi atas keamanan di negara kita semakin menurun. Persepsi itu mempengaruhi keputusan si investor,”ujarnya di Gedng BEI, Rabu(16/5).

Samsul menyampaikan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan jaminan fundamental ekonomi. Lebih dari itu, pemerintah harus meyakinkan soal keberlangsungan investasi dari para investor di Indonesia, terutama dalam kondisi genting saat ini.

Pasalnya, secara fundamental ekonomi, Indonesia masih kuat. Namun, bukan tidak mungkin jika fundamental ekonomi dapat terimbas kondisi keamanan yang terganggu.”Ini yang sebenarnya kita jaga, supaya investor tidak merasa bahwa investasi mereka di Indonesia bisa terhambat,”imbuhnya.

Pihaknya berharap agar kerjasama dari pihak pemerintah dan keamanan dapat segera mengatasi kondisi ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri, keamanan yang goyah turut melemahkan sisi perekonomian. “Investor sebenarnya sudah cukup imun dengan kondisi ini, tapi kan harapan kita ini bisa diatasi secepatnya oleh pihak keamanan agar lebih aman dan investor nyaman untuk investasi,”ujarnya.(kode 13)

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 17 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme* juga terdapat marjinalisasi Labelisasi. Pada kutipan teks berita dengan judul “Investor Mulai Cemaskan Keamanan” yang menjadi pelaku sosial adalah Investor yang mulai mencemaskan keamanan di Indonesia dengan adanya aksi teror bom bunuh diri di Sidoarjo dan aksi teroris di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau yang diserang oleh kawan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai.

*Aksi teror bom bunuh diri dan teroris* isi berita dalam paragraf pertama memberikan julukan aksi *teror bom* bunuh diri kepada masyarakat yang merupakan sebuah aksi yang dilakukan sekawanan kelompok yang menciptakan ketakutan dikalangan masyarakat. Seperti yang terlintas dipikiran masyarakat bahwasannya aksi *kawanan teroris yang membawa senjata tajam jenis samurai* itu terkesan kondisi saat itu sangat tegang sehingga pembaca sangat beranggapan tidak akan ada lagi para investasi yang akan berinvestor dengan nyaman di Indonesia, jika pembacanya adalah salah satu pengusaha yang menjalankan suatu bisnis usaha yang memang memerlukan investor pasti akan berpikir ulang dalam menjalankan bisnisnya tersebut, jangankan untuk menjalankan, untuk memulai saja mungkin ragu.

selanjutnya Labelisasi juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai *teroris*. (kode 20)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 31 Mei 2018 dengan judul berita “Teroris,Waspada Pendatang Baru” terdapat marjinalisasi Labelisasi. Pada kata *teroris* termasuk kedalam pemberian julukan kepada sekelompok pelaku kejahatan yang membuat takut warga-warga. Padahal kata yang dimaksudkan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin hanya sebagai bentuk agar warga atau masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Kapal agar

berhati-hati kepada pendatang baru. Tetapi bukan berarti semua pendatang baru itu adalah teroris.

#### 2.2.4 Analisis Marjinalisasi Stereotipe

Berdasarkan pada kode data 02, 03, 05, 09, 15, 19, 20. Terdapat marjinalisasi jenis Stereotipe. Stereotip adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (tetapi umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan (Eriyanto, 2008:126). Selanjutnya, stereotip merupakan praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif. Kutipan berita tersebut adalah sebagai berikut:

PEKANBARU (RP)- Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mengaku geram dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V alasannya, masih ada buruh harian lepas (BHL) digaji Rp 31 ribu per hari. Hal itu menurutnya sangat *tidak manusiawi*. Serta bertentangan dengan aturan yang ada. Masalah itu diketahui setelah Sugianto datang ke Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Di mana daerah tersebut merupakan areal pekerja PTPN V. “saya sudah kesana. Kamarin saya reses ke Lubuk Dalam. Bertemu BHL dan pegawai PTPN V,” ujar Sugianto, Selasa (1/5) siang.

Lebih lanjut dikatakan dia, dari aduan buruh, pihak perusahaan mengaku diupah Rp 80ribu ketika tim sertifikat *indonesian sustainable palm oil* (ISPO) datang. “*anehnya lagi, saat memberikan upah ke buruh, pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi. Ini saya heran ada permainan apa di sana,*” ungkapnya. (kode 02)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi 2 Mei 2018 dengan judul berita “Dewan Segera Panggil PTPN V” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah PT Perkebunan

Nusantara (PTPN) V. Stereotip tampak digunakan pada frasa yang dicetak tebal . Melalui frasa tersebut, Anggota Komisi B DPRD Riau Sugianto mendeskripsikan mengenai gaji buruh harian lepas (BHL) yang digaji Rp 31 ribu per harinya, hal itu menurutnya sangat *tidak manusiawi* serta bertentangan dengan aturan yang ada. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Sugianto yang telah datang ke lokasi dan bertemu dengan BHL dan pegawai PTPN V. Keterangan yang diperoleh ketika Sugianto bertemu dan mendengarkan aduan dari BHL bahwasannya pihak perusahaan mengaku dengan tim sertifikat *indonesian sustainable palm oil* (ISPO) mereka digaji Rp 80 ribu, sementara kenyataan dilapangan mereka hanya digaji Rp 31 ribu per harinya dan ia juga mengungkapkan pada saat memberikan upah ke buruh pihak perusahaan tidak memberikan kwitansi.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

PEKANBARU(RP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau *curiga ada permainan* di tingkat distribusi sembako. Pasalnya, sejumlah instansi yang telah dimintai keterangan stok pangan di Provinsi Riau aman.

Untuk mengatasi hal itu, tentunya diminta peran penegak hukum. Yakni kepolisian yang seharusnya sudah mulai melakukan operasi. Ia meminta jika kedapatan, mafia sembako agar langsung ditangkap. “Ya, kami minta kepada aparat penegak hukum supaya menangkap pemain sembako. Jangan sampai rakyat semakin menjerit demi keuntungan pribadi,” tegasnya.(kode 03)

Kutipan teks berita tersebut diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi, 2 Mei 2018 dengan judul “Polisi Diminta Tangkap “Pemain” sembako’. Dari judul berita, dapat segera diketahui bahwa selain terdapat *disfemisme*, labelisasi jurnalis juga menggunakan *stereotipe* pada tulisannya. Hal tersebut



terlihat pada penggunaan kata *pemain* pada judul berita dan kalimat pada teks berita di atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau *curiga ada permainan* di tingkat distribusi sembako. yang adanya mengindikasikan pandangan negatif kepada pihak distribusi sembako. Kesannya ada penyeludupan dan penimbunan sembako oleh sejumlah instansi yang ingin mengambil untung.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Marbun pun mengingatkan masyarakat tetap harus mengawasi pergerakan Setnov kini mendekam di Sukamiskin. *Sebab, tidak tertutup kemungkinan Setnov mengajukan PK pada saat kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang menghukum koruptor seperti sekarang ini. Salah satu hakim agung garang yang dimaksud adalah Artidjo Alkostar. (kode 05)*

Kutipan teks berita di atas merupakan teks berita yang dicetak surat kabar harian Riau Pos edisi, 5 Mei 2018. Teks berita tersebut diidentifikasi menggunakan strategi misrepresentasi marjinalisasi kategori *eufemisme*, *difemisme*, juga terdapat marjinalisasi kateori Stereotipe. Pada kutipan teks berita dengan judul “Waspada Setnov Ajukan PK” yang menjadi pelaku sosial adalah Setya Novianto selaku tersangka korupsi yang akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai hukum melawan putusan hakim. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andreas Marbun Marbun menghimbau kepada masyarakat harus tetap mengawasi pergerakan dari seorang tersangka korupsi yakni Setnov karena saat ini kondisi Mahkamah Agung (MA) “kehilangan” hakim pidana yang garang mengukum koruptor seperti sekarang ini.

Stereotipe tampak pada bagian yang dimiringkan karena adanya dugaan pelaku korupsi akan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) untuk meringankan tuntutan sebelumnya yang diterimanya. Andreas memandang subjektif kepada Setnov karena diduga akan mengajukan PK.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

KepalaForensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo akhirnya membuka identitas pria yang didorong di kursi roda tersebut.edi membenarkan jika pria tersebut adalah Wawan Kurniawan alias Abu Afif. “Iya,masih diobservasi,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan *WhatsApp* kemarin.

Hanya sekitar 30 menit dia diperiksa di IGD. Selanjutnya, Abu Afif dirawat di kamar VIP RS Polri. “Luka di bahu kiri,” ujar Edi. Namun, Edi enggan menjelaskan lebih lanjut penyebab luka yang diderita Abu Afif. *Abu Afif diduga sebagai pemicu dan provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada Selasa lalu (8/5). Pemicunya adalah makanan yang dikirim oleh keluarganya tak kunjung diberikan petugas. Dia lalu memprovokasi napi lainnya untuk berontak, menjebol terali besi, dan menyerang petugas, wawan ditahan di Mako Brimob lantaran terlibat kasus terorisme. (kode 09)*

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar harian *Riau Pos* edisi 11 Mei 2018 dengan judul berita “Pimpinan JAD Pekanbaru Terduga Provokator Kerusuhan” Pelakusosial yang dimarginalisasi pada teks berita tersebut adalah pemimpin Amir Jamaah An-Sharut Daulah (JAD) Pekanbaru Abu Afif yang diduga sebagai provokator kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak tebal. Melalui paragraf tersebut, Kepala Forensik RS Polri Kramajati Kombes Pol Edi Purnomo mendeskripsikan pemicu dari kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua .Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari edi yang membenarkan

bahwasannya Abu Afif sebagai pelaku provokator yang menyebabkan terjadinya kerusuhan setelah dihubungi melalui pesan *WhatsApp*.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial Fir (50) berwsama onum honorer bersinisial Azh (43) dipolisikan oleh Aswari yang juga sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kaabupaten Indragiri Hulu (Inhu). *Pasalnya, oknum ASN bersama honorer tersebut diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.*

*Di mana laporan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut sudah diterima Satreskrim Polres Inhu pada Jumat (18/5) pekan kemarin.* Dalam laporan tersebut ada oknum ASN berinisial Fir bertugas di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Inhu dan Ahz, oknum honorer di salah satu kantor camat sebagai terlapor.

Diakuirnya, laporan polisi dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Avanza ke Mapolres Inhu ini, adalah tindak lanjut laporan di Mapolsek Rengat Barat pada 4 November 2014.

Untuk penetapan tersangka dan dugaan keterlibatan orang lain sambungnya, harus dilakukan gelar perkara. Bahkan pihaknya, juga telah menjadwalkan gelar perkara pada pekan depan. *“Sepertinya laporan di Polsek Rengan Barat tidak sesuai dengan kejadiannya. Sehingga wajar saja ada laporan baru di Satreskim,” terangnya.*(kode 15)

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 24 Mei 2018 dengan judul berita “Oknum ASN dan Honorer Dipolisikan”. Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah oknum ASN dan honorer. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring. Melalui paragraf tersebut, Aswari yang juga sama-sama ASN di lingkungan Pemerintah Kaabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melaporkan ASN inisial Fir (50) dan honorer inisial Azh (43) yang *diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza..* Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan



pernyataan dari korban yang melaporkan kedua terduga tersangka tersebut dengan dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Toyota Avanza.

selanjutnya Stereotipe juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

BANGKINANG (RP)- Puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar), menggelar aksi unjuk rasa atau demo di halaman depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Senin (28/5). *Para mahasiswa dan pemuda ini menuding adanya monopoli dalam pembagian proyek-proyek di Pemkab Kampar.*

*Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut.*

*“Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,” ungkapnya.*

Sekda Kampar Yusri yang berhasil dihubungi wartawan sore kemarin menyebutkan, para pendemo itu bukan tidak ditemui pemkab. Tapi waktu aksi mereka terlalu singkat dan mereka juga menggelar demo berdekatan dengan waktu salat Zuhur. Hingga ketika adzan sudah mulai dekat, baik pendemo maupun Pemkab Kampar sudah sama-sama tidak ada waktu lagi.

*Ketika ditanya terkait tudingan monopoli proyek, Yusri tiidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang ada yang katanya seperti itu, itu saran saya” Terangnya. (kode 19)*

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 29 Mei 2018 dengan judul berita “Demo, Mahasiswa Tuding Ada Monopoli Proyek di Kampar”. Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah puluhan mahasiswa yang menyebut diri sebagai Mahasiswa Pemuda Kampar (Gempar). Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak miring.



Melalui paragraf tersebut, para mahasiswa melakukan demo terhadap Monopoli proyek yang ada di Kampar. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Koordinator aksi unjuk rasa Elangga menyebutkan, mereka curiga ada pengaturan dalam proses lelang proyek selama 2017 dan 2018. Hanya saja Elangga dalam orasinya juga *tidak menyebut paket proyek mana yang dicurangi tersebut*. “Bahwa ada permainan dalam proses lelang itu sudah nyata. Namun belum ada tindakan dari penegak hukum. Tidak ada gunanya lagi mengikuti lelang, karena perusahaan pemenangnya sudah ada,”. Namun, Ketika ditanya terkait tuduhan monopoli proyek, Sekretaris Daerah Kampar Yusri tidak yakin itu benar. Malah menurut Yusri, kalau mahasiswa yakin dan punya bukti, dirinya menyarankan agar pendemo menemui satker terkait langsung. “Bisa langsung ke satker saja kalau memang ada yang katanya seperti itu, itu saran saya”.

selanjutnya Stereotype juga terdapat pada kutipan di bawah ini:

Bengkalis (RP)- Terkait ditangkapnya terduga teroris oleh densus 88 Anti Teror di kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, *Bupati Bengkalis Amril Mukminin meminta masyarakat daerah ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru. “Belum lama ini, densus 88 menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris.(kode 20)*

Kutipan teks berita di atas diterbitkan oleh surat kabar Riau Pos edisi 31 Mei 2018 dengan judul berita “Teroris,Waspada Pendatang Baru” Pelaku sosial yang dimarjinalisasi pada teks berita tersebut adalah seorang pendatang baru yang diduga sebagai Teroris. Stereotip tampak digunakan pada paragraf yang dicetak tebal. Melalui paragraf tersebut Bupati Bengkalis mengingatkan kepada

masyarakat agar lebih waspada terhadap pendatang baru perihal densus 88 Anti Teror yang menangkap seseorang terduga teroris di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert. Deskripsi tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari Amril Mukminin yang meminta kepada masyarakat Bengkalis agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pendatang baru karena Densus 88 belum lama ini menangkap salah seorang warga Tanjung Kapal yang diduga sebagai teroris.

### 2.3 Interpretasi Data

Berdasarkan deskripsi dan analisis data diatas, penulis memberikan interpretasi data tentang marjinalisasi dalam berita pada surat kabar harian *Riau Pos*. Ada empat indikator yang menjadi analisis dalam permasalahan ini yaitu: 1. *Eufemisme* (penghalusan makna), 2. *Disfemisme* (pengasaran bahasa), 3. *Labelisasi*, 4. *Stereotipe*;

*Pertama*, pada *Eufemisme* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat hanya lima data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *eufemisme*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* kurang menggunakan *eufemisme* dalam penulisan beritanya karena kurang memberitakan tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah.

*Kedua*, pada *Disfemisme* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang

berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat dua belas data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *disfemisme*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* banyak sekali menggunakan *disfemisme* dalam penulisan beritanya karena banyak memberitakan tindakan kelompok masyarakat bawah.

*Ketiga*, pada *labelisasi* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat hanya tiga data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *labelisasi*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* kurang menggunakan istilah ofensif kepada kelompok kelas atas kepada kelompok kelas bawah.

*Keempat*, pada *Stereotipe* berkaitan dengan berita yang mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Pada penelitian ini, semua berita yang berjumlah dua puluh data pada surat kabar harian *Riau Pos* terdapat tujuh data yang menggunakan teknik marjinalisasi jenis *stereotipe*, dengan begitu dalam surat kabar harian *Riau Pos* dikatakan cukup banyak menggunakan *stereotipe* dalam penulisan beritanya karena penilaian subyektif kepada orang, kelas, atau perangkat tindakan.